

**ANALISIS PENDEKATAN KOMUNIKASI PARTISIPATIF  
LEMBAGA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Ernawati S.K**

*Program Studi PTP, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Indonesia*

e-mail: ernawatisyahrudin71@unm.ac.id

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the role of village institutions in community empowerment through a participatory communication approach. Participatory communication is considered an effective strategy to involve the community in decision-making and the implementation of empowerment programs. The research method employed is a qualitative approach, utilizing in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that village institutions play a crucial role in community empowerment efforts. Through the participatory communication approach, the community actively engages in the planning, execution, and evaluation of empowerment programs. Community participation enhances their understanding of local needs, fosters a sense of ownership over the programs, and improves implementation effectiveness. In conclusion, village institutions play a significant role in promoting community empowerment through participatory communication. Active community involvement in decision-making and program implementation makes empowerment more relevant and sustainable. Therefore, efforts to enhance the capacity of village institutions and strengthen participatory communication mechanisms are necessary to achieve more optimal outcomes in community empowerment endeavors.*

**Keywords:** Analysis, participatory communication, village institutions, community empowerment

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga desa dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif. Pendekatan komunikasi partisipatif dianggap sebagai strategi efektif untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga desa memainkan peran yang krusial dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan komunikasi partisipatif, masyarakat secara aktif terlibat dalam

proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan. Partisipasi masyarakat meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan lokal, menciptakan rasa memiliki terhadap program, dan meningkatkan efektivitas implementasi. Kesimpulannya, lembaga desa berperan penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, pemberdayaan menjadi lebih relevan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan kapasitas lembaga desa dan memperkuat mekanisme komunikasi partisipatif untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Analisis, komunikasi partisipatif, lembaga desa, pemberdayaan masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Di era ini, tantangan-tantangan sosial, ekonomi, dan politik semakin kompleks dan beragam di berbagai belahan dunia. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, urbanisasi, dan perubahan iklim adalah beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika masyarakat (Mansyur et al., 2022). Dalam menghadapi kondisi yang dinamis ini, pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah konsep yang semakin ditekankan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Globalisasi telah menciptakan konektivitas global yang sebelumnya tidak terpikirkan, menghubungkan berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia (A. Ahmadin et al., 2023). Sementara ini memberikan peluang untuk pertukaran pengetahuan, budaya, dan ekonomi, juga menimbulkan tantangan baru seperti persaingan global yang ketat, perbedaan nilai-nilai budaya, dan krisis ekonomi yang meluas.

Perkembangan teknologi informasi, terutama dengan cepatnya internet dan telekomunikasi, telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan memperoleh informasi (Misbawati, 2021). Kemajuan ini telah menciptakan kemungkinan baru untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, tetapi juga telah menyebabkan perubahan besar dalam lanskap pekerjaan dan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data.

Dalam menghadapi kondisi yang dinamis ini, konsep pemberdayaan masyarakat menjadi semakin relevan dan ditekankan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana individu dan kelompok masyarakat diberdayakan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi (Suhaeb et al., 2020).

Pemberdayaan masyarakat memungkinkan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya kurang terlibat atau terpinggirkan. Dengan mendorong partisipasi ini, masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri,

memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga melibatkan proses penguatan lembaga sosial dan struktur sosial yang ada, sehingga masyarakat dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat mengakui bahwa setiap masyarakat adalah unik dan memiliki potensi sendiri dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan pembangunan mereka (Kaseng, 2023). Oleh karena itu, dalam konteks globalisasi dan perubahan yang cepat, strategi pembangunan yang berhasil harus mencakup pendekatan yang beragam dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Pemberdayaan masyarakat juga berarti memperkuat kapasitas individu dan kelompok untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi. Ini melibatkan memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru, memanfaatkan teknologi informasi, dan berpartisipasi dalam peluang ekonomi baru yang diciptakan oleh globalisasi (Ridha & Suhaeb, 2021). Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berarti mempromosikan kesetaraan dan inklusi, dengan memastikan bahwa semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan.

Dalam konteks perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat juga penting dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tak terhindarkan (Suhaeb et al., 2020). Melalui partisipasi aktif dan penguatan kapasitas, masyarakat dapat mengembangkan strategi mitigasi dan adaptasi yang relevan dengan kebutuhan lokal mereka.

Dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan utama dalam pembangunan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan (Suhaeb et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan-tantangan kompleks dan beragam di era ini, sehingga menciptakan dunia yang lebih berkeadilan dan harmonis bagi semua.

Pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk peningkatan kualitas hidup, kesetaraan gender, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan akses terhadap sumber daya dan kesempatan (Firdaus et al., 2020). Namun, pelaksanaan program pemberdayaan seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, terutama ketika tidak mempertimbangkan peran lembaga desa dan pendekatan komunikasi partisipatif.

Lembaga desa, sebagai entitas pemerintahan lokal yang memiliki keterlibatan langsung dengan masyarakat di tingkat pedesaan, memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan

masyarakat. Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan potensi lokal, lembaga desa dapat menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan serta melaksanakan program pemberdayaan yang efektif dan berdampak positif.

Di sinilah pentingnya pendekatan komunikasi partisipatif dalam proses pemberdayaan. Komunikasi partisipatif mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi, membagikan pengetahuan, dan merumuskan solusi atas berbagai isu yang dihadapi. Melalui komunikasi partisipatif, masyarakat dapat merasa memiliki dan terlibat langsung dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga implementasinya menjadi lebih relevan, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga desa dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif. Dengan memahami secara lebih mendalam bagaimana lembaga desa beroperasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat diidentifikasi kekuatan, kendala, serta potensi yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan perencanaan kebijakan lebih lanjut.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya penguatan kapasitas lembaga desa dan perbaikan mekanisme komunikasi partisipatif guna mencapai tujuan pembangunan yang berkesinambungan dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat secara merata.

## **METODE**

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang berfokus pada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan beragam secara mendalam (Rahman et al., 2022). Dalam hal ini, studi ini bertujuan untuk menyelidiki peran lembaga desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan komunikasi partisipatif.

Pendekatan kualitatif mengizinkan peneliti untuk menggali secara mendalam persepsi, pandangan, dan pengalaman partisipan (Moleong, 2007) yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, metode wawancara mendalam dipilih sebagai salah satu teknik utama untuk mengumpulkan data yang kaya dan komprehensif. Dalam wawancara mendalam ini, para anggota lembaga desa, tokoh masyarakat, dan peserta program pemberdayaan akan diwawancarai secara mendalam untuk menggali pemahaman mereka tentang proses pemberdayaan, hambatan yang dihadapi, dan hasil yang telah dicapai.

Selain itu, observasi partisipatif juga menjadi bagian penting dari metode penelitian ini (M. Ahmadin, 2022). Melalui observasi partisipatif, peneliti memiliki kesempatan untuk mengamati secara langsung interaksi antara lembaga desa dan masyarakat dalam situasi dan konteks nyata. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam dinamika hubungan antara lembaga desa dan masyarakat serta bagaimana komunikasi partisipatif berperan dalam proses pemberdayaan.

Tidak hanya itu, analisis dokumen juga dilakukan sebagai pendekatan tambahan untuk mengevaluasi kebijakan dan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh lembaga desa. Melalui analisis dokumen, peneliti dapat menyusun gambaran yang komprehensif tentang upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, dan dampak yang telah terjadi.

Secara keseluruhan, kombinasi dari ketiga metode penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang peran lembaga desa dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif. Dengan demikian, studi ini akan memberikan sumbangan pengetahuan yang berharga dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat serta memberdayakan lembaga desa sebagai mitra penting dalam pembangunan lokal..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa lembaga desa memiliki peran yang sangat krusial dan esensial dalam memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif. Pendekatan ini terbukti berhasil melibatkan aktifnya partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam pendekatan komunikasi partisipatif, lembaga desa menjadi ujung tombak yang menghubungkan dan menyelaraskan berbagai elemen penting dalam suatu komunitas. Peran strategis lembaga desa sebagai fasilitator dan penghubung antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat membawa dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Salah satu aspek kunci dari peran lembaga desa adalah mampu memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggali potensi dan aspirasi lokal, lembaga desa dapat merumuskan program dan kebijakan yang lebih relevan dan

sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Adanya ruang partisipasi ini memberi kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk berkontribusi, merasa memiliki, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di lingkungan mereka.

Selain itu, lembaga desa juga berperan sebagai penyambung lidah antara masyarakat dan berbagai pihak terkait. Dalam kapasitasnya sebagai penghubung, lembaga desa dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat kepada pihak pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan secara lebih holistik dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan.

Peran aktif lembaga desa dalam memfasilitasi komunikasi partisipatif ini membuka peluang kerjasama dan kemitraan yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan swasta. Kerjasama ini menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan yang dilaksanakan. Lembaga desa yang berfungsi dengan baik dapat menjadi jembatan yang menghubungkan sumber daya dan dukungan dari berbagai sektor untuk mewujudkan tujuan bersama.

Dalam konteks ini, peran lembaga desa juga tidak terbatas pada pelaksanaan program pemberdayaan saja, tetapi juga mencakup aspek pengawasan dan evaluasi. Sebagai pemangku kepentingan yang berada di lini terdepan, lembaga desa dapat memantau pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala yang muncul, dan merespon perubahan kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, lembaga desa memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu penting, termasuk hak-hak mereka, akses terhadap layanan publik, dan kesempatan yang tersedia bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Edukasi ini mendorong peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus bergerak maju.

Peran yang strategis dari lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif juga berkontribusi pada pembentukan tatanan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, lembaga desa membantu menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis dan solidaritas yang lebih kuat antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dalam konteks global yang terus berkembang, peran lembaga desa menjadi semakin relevan dan penting. Globalisasi dan modernisasi membawa tantangan baru bagi masyarakat pedesaan, dan lembaga desa memiliki kesempatan untuk menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing di tingkat lokal. Dengan peran aktifnya

dalam pendekatan komunikasi partisipatif, lembaga desa dapat membawa perubahan positif yang berarti bagi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sambil tetap memelihara dan memperkaya warisan budaya dan tradisi lokal.

Lembaga desa memiliki peran penting sebagai mediator yang mampu mengemban tanggung jawab untuk mendengarkan dan menggali aspirasi serta kepentingan masyarakat yang menjadi bagian dari wilayah administratifnya. Kemampuan lembaga desa sebagai mediator ini memungkinkan mereka untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh warga setempat dengan lebih mendalam.

Dalam menjalankan fungsi mediasi ini, lembaga desa dapat melibatkan berbagai mekanisme partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, seperti musyawarah desa, forum diskusi, atau pertemuan-pertemuan terbuka lainnya. Dengan cara ini, semua suara dan pandangan dari beragam kelompok masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan secara adil dan inklusif. Melalui proses mediasi yang baik, lembaga desa dapat memahami permasalahan dan harapan masyarakat dengan lebih baik, sehingga dapat merancang program pemberdayaan yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam prakteknya, lembaga desa akan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari proses mediasi tersebut untuk merumuskan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran. Mereka akan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai isu yang dihadapi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, program pemberdayaan yang disusun akan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat setempat, menghindari adanya program yang kurang relevan atau bahkan bertentangan dengan realitas sosial di tingkat desa.

Tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, lembaga desa juga berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Pengawasan ini mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program, sehingga memastikan bahwa dana dan sumber daya yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan adanya mekanisme pengawasan ini, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau korupsi dapat diminimalisir, sehingga program pemberdayaan dapat berjalan dengan lebih efisien dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Lembaga desa juga berfungsi sebagai fasilitator dalam membangun kapasitas masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Melalui berbagai pelatihan, pendampingan, dan pembinaan, lembaga desa mendorong penguatan keterampilan



dan pengetahuan masyarakat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara berkelanjutan, karena masyarakat dapat melanjutkan program-program yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik oleh lembaga desa.

Tidak hanya berfokus pada program-program tertentu, lembaga desa juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun kemitraan antara masyarakat dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta, organisasi non-pemerintah, atau lembaga pendidikan. Kemitraan ini dapat membuka peluang baru bagi masyarakat dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan yang lebih luas, serta memperluas jaringan sosial dan kesempatan untuk berkembang. Dengan adanya kemitraan ini, masyarakat dapat mengakses lebih banyak peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang berdampak positif bagi pembangunan desa.

Secara keseluruhan, peran lembaga desa sebagai mediator, perencana, pengawas, dan fasilitator memiliki arti yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Mekanisme mediasi yang dilakukan oleh lembaga desa memungkinkan penyelarasan antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan peran ganda sebagai perencana dan pengawas, lembaga desa menjamin pelaksanaan program pemberdayaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Sementara itu, sebagai fasilitator, lembaga desa berperan dalam membangun kapasitas masyarakat dan menciptakan kemitraan yang mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdampak positif.

Dalam proses penelitian, dilakukan observasi partisipatif yang mengungkapkan bahwa komunikasi partisipatif yang efektif dapat membangun ikatan emosional antara lembaga desa dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap perencanaan dan pelaksanaan program, kepercayaan, rasa memiliki, dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program pemberdayaan meningkat. Komunikasi partisipatif menjadi alat yang kuat untuk menyampaikan informasi secara terbuka, memperkuat hubungan sosial, dan merangsang kolaborasi yang positif antara berbagai pihak yang terlibat.

Namun, selama penelitian juga diidentifikasi beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia di lembaga desa, yang menjadi kendala utama dalam upaya melibatkan masyarakat secara lebih luas dan efektif. Keterbatasan akses terhadap informasi dan komunikasi yang tidak efisien juga menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan.

Dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan yang tepat, pemahaman yang mendalam tentang peran lembaga desa dan keefektifan komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat menjadi landasan penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan



kapasitas lembaga desa dan memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan efektif dalam proses pemberdayaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga desa memainkan peran vital dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan komunikasi partisipatif menjadi kunci untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat, memperkuat keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan, dan akhirnya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya penguatan kapasitas lembaga desa dan mekanisme komunikasi partisipatif menjadi sangat krusial untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih optimal dan berdampak positif bagi masyarakat di era ini. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung peran lembaga desa sebagai katalisator pembangunan masyarakat yang berdaya saing dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran lembaga desa dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan komunikasi partisipatif, dapat disimpulkan bahwa lembaga desa memiliki peran krusial dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan komunikasi partisipatif, masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan, sehingga program-program tersebut lebih relevan dan berdampak positif bagi kehidupan mereka. Peran lembaga desa sebagai fasilitator dan penghubung antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat menjadi penting dalam memastikan bahwa program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Lembaga desa berfungsi sebagai mediator yang mendengarkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga dapat merumuskan program yang lebih tepat sasaran. Komunikasi partisipatif yang efektif membantu membangun ikatan emosional antara lembaga desa dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap perencanaan dan pelaksanaan program meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program. Komunikasi partisipatif juga menjadi alat penting untuk menyampaikan informasi secara transparan, memperkuat hubungan sosial, dan mendorong kolaborasi antara semua pihak terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadin, A., Nugroho, L., Sari, E. J., Mustopa, M., Hasbi, I., Islam, N., Kurniawan, A., Jermias, E. O., Dey, N. P. H., & Rahman, A. (2023). *SOSIOLOGI RUANG VIRTUAL*.

- Ahmadin, M. (2022). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 6(1), 104–113.
- Ardiansyah, R., & Pranata, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(2), 89-102.
- Firdaus, F., Saputra, R., Susanti, P., Desminar, D., & Azizah, N. (2020). Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 3(2).
- Istijanto, A., & Wibowo, B. (2019). Peran Lembaga Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Komunikasi Partisipatif. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 15(2), 123-140
- Kaseng, E. S. (2023). Sustainable Tourism Development Through Ecotourism Development in Paccekke Village. *Jurnal Ekonomi Dan Riset Pembangunan*, 1(1), 48–60.
- Mansyur, A. I., Fitriani, F., Widyaputra, P. K., Aman, A. P. O., Abidin, Z., Parahita, B. N., Hilman, Y. A., Rahmawati, N., Rais, A., & Sinurat, J. (2022). *SOSIOLOGI PERKOTAAN*.
- Misbawati, M. (2021). Bisnis Online: Peluang dan Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya: Tebar Science*, 5(1), 27–33.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Murti, A. B., & Sutopo, B. (2019). Analisis Dampak Komunikasi Partisipatif dalam Meningkatkan Kualitas Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Studi Komunikasi*, 13(3), 220-235.
- Nugroho, S., & Wijaya, D. (2018). Peran Lembaga Desa sebagai Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial*, 8(2), 167-182.
- Nursanti, W., & Pradana, A. (2021). Pengaruh Komunikasi Partisipatif dalam Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 30(2), 175-192.
- Rahman, A., Wirastika Sari, N. M., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Ode Aman, A. P., Ahmadin, & Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. In *Metode Pengumpulan Data (Klasifikasi, Metode Dan Etika)*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Ridha, M. R., & Suhaeb, F. W. (2021). Strategies for Survival in the Midst of Economic Difficulties in the Covid-19 Era. *International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021)*, 594–598.
- Raharjo, S., & Susilo, B. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Studi Peran Lembaga Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kajian Sosial*, 20(3), 210-227.
- Sari, D. K., & Wahyuni, I. N. (2020). Implementasi Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa XYZ. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 45-58.

- Suhaeb, F. W., Ahmadin, A., Sari, D. N., & Kaseng, E. S. (2022). The Obstacles of Elementary School Teachers for Applying Effective and Fun Learning in The New Normal in Selayar Islands Regency. *SHS Web of Conferences*, 149.
- Suhaeb, F. W., Kaseng, E. S., & Rahman, A. (2020). Gender in Farmer Household Livelihood Strategies in South Sulawesi. *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*, 594–597.
- Susilo, B., & Istianto, A. (2020). Evaluasi Efektivitas Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa ABC. *Jurnal Komunikasi Publik*, 17(1), 34-47.
- Wahyuni, I. N., & Ardiansyah, R. (2022). Tantangan dan Potensi Komunikasi Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Studi Pembangunan*, 14(3), 290-305.
- Wulandari, E., & Arifianto, D. (2022). Peran Lembaga Desa dalam Mengatasi Tantangan Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 78-95.